

NASKAH PUBLIKASI

KERJA SAMA MILITER INDONESIA-CHINA

(Studi Kasus pada Pasca Sengketa Laut China Selatan di Natuna)



Disusun Oleh:

**ANGGUN DWI PANORAMA
20151060021**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Dengan ini kami selaku mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nama : Anggun Dwi Panrama

NIM : 20151060021

Jenjang Program Studi : S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional

SETUJU jika naskah publikasi (jurnal ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapat arahan dari pembimbing, dipublikasikan untuk kepentingan akademik.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Anggun Dwi Panorama

KERJA SAMA MILITER INDONESIA-CHINA
(Studi Kasus pada Pasca Sengketa Laut China Selatan di Natuna)

Anggun Dwi Panorama

anggunpanorama@gmail.com

Magister Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to explain about the cooperation in the military field between Indonesia and China as name Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cooperation Activities in the Field of Defence which was established on 7 November 2007 in Beijing, hereinafter referred to as the agreement. Content in other policies that work together with information exchange and protection, staff exchange in the context of professional education and training, reciprocal visits, and joint research. With that, this research is used to find out the reasons the Indonesian government make cooperation with the Chinese military. The method used in this research is descriptive qualitative decision making process and supported. While the data used in this study are primary data (interview) and secondary (literature study). The findings used in this study are that Indonesia make cooperation in the military field between Indonesia and China is influenced by the military situation experienced by Indonesia, such as the Indonesian military economic condition, and issues related to the South China Sea and nationalism.

Keywords: Cooperation. Indonesia-China, Decision Making Process

KERJA SAMA MILITER INDONESIA-CHINA
(Studi Kasus pada Pasca Sengketa Laut China Selatan di Natuna)

Anggun Dwi Panorama

anggunpanorama@gmail.com

Magister Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

INTISARI

Kerjasama militer Indonesia-China dalam Bidang Pertahanan yakni dalam bentuk *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cooperation Activities in the Field of Defence* yang telah ditandatangani pada tanggal 7 November 2007 di Beijing dan selanjutnya disebut dengan persetujuan. Muatan dalam persetujuan antara lain lingkup kerja sama yang meliputi pertukaran informasi mengenai kelembagaan dan masalah pertahanan, pertukaran para pejabat dalam rangka pendidikan dan pelatihan profesional, saling kunjung dan riset bersama. Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah Indonesia menyetujui kerja sama militer dengan China. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan didukung dengan teori *decision making process*. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer (wawancara) dan sekunder (studi pustaka). Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu Indonesia menyetujui kerja sama militer dengan China karena dipengaruhi oleh politik dalam negeri Indonesia, kondisi ekonomi militer Indonesia, serta untuk mendorong secara damai terkait isu Laut China Selatan serta memperkuat pertahanan nasional

Kata Kunci: Kerjasama, Indonesia-China, Proses pembuatan keputusan

1. PENDAHULUAN

Kerja sama militer adalah salah satu bentuk hubungan internasional. Hubungan internasional mencakup kerja sama internasional yang mana kerja sama antara semua negara di seluruh dunia atau mayoritas negara di dunia dalam kepentingan skala dunia. Kerja sama internasional dibentuk dalam beberapa organisasi internasional di dunia ini dan meliputi semua bidang salah satunya yakni kerja sama militer. Kerja sama militer merupakan suatu kerja sama yang mungkin untuk dilakukan apabila terdapat dua kekuatan yang satu dengan lainnya memiliki kesamaan dalam masalah keamanan. Kerja sama internasional di bidang pertahanan atau diplomasi pertahanan merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, UUD 1945, Perundang-undangan, Kebijakan dan Strategi Pertahanan serta hasil kajian terhadap lingkungan strategis baik global maupun regional. (Parulian, 2013, p. 35)

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat China diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja Sama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Cooperation Activities in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 7 November 2007 di Beijing, yang selanjutnya disebut dengan persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang. Pada tanggal 30 Maret 2016 resmi disahkannya undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang kerja sama aktivitas dalam bidang pertahanan.

Kerja sama yang akan dilakukan militer Indonesia dengan militer China antara lain seperti tukar menukar informasi, kunjungan-kunjungan, *Transfer of Technology* (TOT), pelatihan di bidang pertahanan serta patroli bersama (reswi, 2016). Dalam UU yang sudah disahkan pada tanggal 30 Maret 2016, materi muatan dalam persetujuan antara lain lingkup kerja sama yang meliputi pertukaran informasi mengenai kelembagaan dan masalah pertahanan, pertukaran para pejabat dalam rangka pendidikan dan pelatihan profesional, saling kunjung dan riset bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan persetujuan bersama, pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi,

pelatih, dan bentuk kerja sama teknis lainnya berdasarkan prinsip timbal balik dan persetujuan bersama, peningkatan kerja sama antara institusi dalam bidang teknologi pertahanan dan industri kedua negara untuk keuntungan dan kepentingan bersama para pihak, kerja sama di bidang latihan pertahanan dan kerja sama di bidang lain yang menjadi kepentingan bersama. Kemudian Pembentukan Komite Bersama, guna memonitor, mengatur dan mengimplementasikan persetujuan ini. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah yang dialihkan atau diciptakan berdasarkan persetujuan ini, yang disepakati oleh organisasi dari para pihak di bidang kerja sama yang lebih khusus. Para pihak berkewajiban melindungi informasi rahasia yang dapat diperoleh dari kerangka Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan negara masing-masing. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik. (RI, 2016)

Berdasarkan dari kasus di atas pemerintah Indonesia menerima adanya jalinan hubungan kerja sama militer dengan China. Meskipun pada saat itu situasi Indonesia dan China sedang memanas terkait konflik di Natuna karena hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tujuan Indonesia menyetujui adanya kerja sama militer dengan China. Terlebih diresmikannya Undang-Undang terhitung sangat cepat sekali pasca terjadinya konflik dengan China.

2. STUDI PUSTAKA

Peningkatan Kapabilitas Militer China & Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional Indonesia. Oleh Abar Rayyan Subekti (Tesis 2012). Dalam tesis ini dipaparkan peningkatan kapabilitas militer China berjalan seiring dengan pertumbuhan perekonomian China yang berjalan signifikan. Peningkatan kapabilitas militer China menimbulkan ancaman serta potensi konflik terutama dikawasan Laut China Selatan. Tesis ini bercerita tentang kemampuan industri pertahanan China yang maju dengan dapat memproduksi sendiri sebagian besar dari alutsista yang dimiliki. Kondisi ini merupakan sebuah ancaman bagi negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia.

Indonesia's Interest In Building Military Cooperation With Tiongkok In Producing The C-705 Missil (Jurnal 2016 oleh Meina Rizki Amalia). Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang membahas tentang kerja sama yang dijalin Indonesia dengan Tiongkok dalam pembelian alutsista berupa peluru kendali jenis C- 705 yang disertai transfer teknologi oleh Tiongkok kepada Indonesia. Dengan adanya kerja sama ini, Indonesia juga dapat meningkatkan pertahanan wilayah perbatasan dengan teknologi terbaru sehingga dapat menciptakan efek gentar terhadap negara tetangga. Tercapainya kepentingan jangka pendek tersebut merupakan hasil positif dari kerjasama yang dijalin Indonesia dengan Tiongkok

3. KERANGKA TEORI

Untuk melihat permasalahan di atas, digunakan kerangka pemikiran, baik teori maupun konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan. Sebelum menguraikan teori yang dipakai untuk menganalisa permasalahan yang ada, lebih dulu akan diuraikan apa yang disebut teori. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu terjadi, dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar prediksi. Dari pengertian ini, secara gamblang teori bisa dikatakan sebagai suatu pandangan atau persepsi mengenai sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. (Mas' oed, 1990, hal. 109) Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu atau fenomena tertentu. Untuk menganalisa permasalahan yang ada, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Decision Making Process

Kajian mengenai Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*The Decision Making process*) menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternative yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternative kebijakan yang mungkin

dilakukan dan sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Menurut William D. Coplin, Teori pengambilan keputusan Luar Negeri atau *Foreign policy*, yaitu : (Coplin W. D., 1992, hal. 30)

“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan.” Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri :

- a. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya mendasari tingkah laku manusianya.
- b. Situasi Ekonomi dan Militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
- c. Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

4. PEMBAHASAN

Kerja sama dalam bidang militer adalah salah bentuk upaya China dalam mewujudkan komitmen sebagai negara militer kuat global. Kerja sama militer Indonesia China dimulai pada tahun 2007 dalam pembuatan perjanjian pertahanan dalam masa jabatan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Selama ini hubungan Indonesia dan China sering mengalami pasang surut secara dinamis dari waktu ke waktu. Sepanjang 2016 sudah sedikitnya tiga kali insiden terjadi di Natuna dengan

permasalahan yang sama. Dalam perkembangannya, aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh nelayan China berulang kali melanggar kedaulatan perairan Indonesia di Natuna. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat China diwujudkan dalam bentuk persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang kerja sama aktivitas dalam Bidang Pertahanan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama militer Indonesia-China ini adalah sebagai berikut :

DOMESTIC POLITIC FACTOR : Adanya Tekanan Ekonomi Politik

Kajian mengenai Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*The Decision Making process*) menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai *alternative* yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternative kebijakan yang mungkin dilakukan dan sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. (Coplin W. D., 1992, hal. 30)

Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya, walaupun kepentingan nasional suatu negara pada saat itu ditentukan oleh pihak yang berkuasa pada era tersebut. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara-negara maupun aktor lain dari negara tersebut mengadakan berbagai macam kerja sama bilateral, trilateral, regional ataupun multilateral (Perwita & Yani, 2005). Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri.

Terdapat empat aktor politik dalam negeri yang mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri (*policy influencer*) yaitu Birokrat (*bureaucratic influencer*), Partai

(*Partisan influencer*), Kelompok Kepentingan (*Interest influencer*), dan Massa atau pendapat masyarakat (*Mass influencer*). Coplin membedakan aktor yang mempengaruhi dengan para pembuat kebijakan sehingga pada kategori partai yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, tidak termasuk para pejabat terpilih seperti yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Coplin juga menjelaskan bahwa meskipun perlu dibedakan antara pembuat kebijakan dengan *policy influencer*, namun terkadang cukup sulit untuk mengadakan perbedaan itu karena sering kali satu pihak memainkan dua peran sekaligus. Yaitu peran sebagai *policy influencer* dan sebagai pembuat kebijakan, terutama dalam birokrasi politik luar negeri. (Coplin & Marbun, 2003)

Partai yang mempengaruhi kebijakan atau *Partisan influencer* adalah kategori *policy influencer* yang bertindak untuk menerjemahkan tuntutan publik menjadi tuntutan politis yang kemudian disampaikan kepada para pembuat kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. *Policy influencer* kategori ini berupaya untuk mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan pihak-pihak yang berkuasa di pemerintahan dan dengan menyediakan kader-kader yang mampu berperan dalam pembuatan kebijakan. *Partisan influencer* juga sering berfungsi sebagai informasi dua arah antara para pembuat kebijakan dengan masyarakat. (Coplin & Marbun, 2003) Namun dalam sebagian kasus, *Partisan influencer* memainkan peran yang terbatas dalam memengaruhi kebijakan luar negeri satu negara. Alasan utamanya adalah karena *Partisan influencer* lebih cenderung untuk memperhatikan keadaan politik dalam negeri dibandingkan politik luar negeri. Isu yang sering diperhatikan oleh *partisan influencer* biasanya merupakan isu keamanan nasional, imigrasi, dan bantuan luar negeri. Meski demikian, pembuat keputusan membutuhkan dukungan dari kelompok ini demi memelihara rezim. (Coplin & Marbun, 2003)

Namun Coplin menjelaskan bahwa, dengan memperhitungkan opini publik bukan berarti bahwa para pembuat kebijakan dikendalikan oleh opini massa atau *Mass influencer* tersebut. Dalam beberapa kasus, para pembuat kebijakan menggunakan peluang untuk memanipulasi opini publik untuk mendukung kebijakan yang mereka buat. Walaupun masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, tapi jarang dari mereka yang menyaring informasi yang mereka peroleh. Serta, walaupun masyarakat mampu menyaring informasi yang diperoleh, sebagian dari masyarakat tersebut tidak

memiliki kemampuan dalam memberikan arahan yang baik kepada para pembuat kebijakan politik luar negeri. Dalam sebagian kasus, opini publik digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merasionalisasikan atau membenarkan tindakan-tindakan politik luar negeri yang dibuat dan bukan menggunakan opini publik sebagai penentu kebijakan. Pembuat kebijakan membutuhkan dukungan dari *mass influencer*, terutama pada saat menjelang pemilihan umum, sehingga para pembuat kebijakan memperhatikan dampak suatu kebijakan terhadap opini publik dan pada pemilu yang akan datang. (Coplin & Marbun, 2003)

Kepentingan Indonesia menjalin kerja sama militer dengan China dipengaruhi dengan faktor politik dalam negeri yaitu adanya faktor kelompok kepentingan yang mempengaruhi. Ketika ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang bisa dilakukan kerja sama yang baik akan tetap bisa dilakukan. Negara tidak bisa lagi menghambat hal itu, kalau kekuatan dari kelas-kelas kapitalis antar kedua negara ini sudah melakukan hal kerja sama yang cukup erat, wajar apabila ada momen-momen yang renggang kemudian erat, analogi Indonesia Cina tegang pada tahun 70-80an Indonesia sempat tidak membuka hubungan diplomatik dengan China tapi pada tahun 90an terbuka kembali. Pembukaan hubungan diplomatik itu kemudian menjadi mulus karena adanya kepentingan-kepentingan kelas kapitalis Indonesia yang pada saat itu mengalami ekspansi investasi di China.

Adanya kedekatan pengusaha-pengusaha Indonesia dengan pengusaha-pengusaha China pada saat itu kemudian disampaikan konglomerat Indonesia kepada Soeharto. Proses pemulihan diplomatik kalau sudah lama cukup sulit sebenarnya tapi karena adanya proses kedekatan yang cukup baik bisa jadi lebih mudah. Hanya satu faktor yang membuat kapital mereka berkurang yaitu krisis. Kemudian investasi tidak lagi dibatasi oleh aturan-aturan, akan tetapi aturan-aturan yang ada justru memberi kemudahan bagi proses merger dan akuisisi. Kerja sama ekonomi di Asia Tenggara sangat dipengaruhi kelas kapitalis (kelompok masyarakat yang menguasai alat produksi). Proses investasi dari satu konglomerat ke konglomerat lain sangat besar. Ada jaringan kelas kapitalis yang terbangun yang nanti akan berdampak pada kekuatan oligarki (aliansi kelas kapitalis dengan penguasa) di Asia Tenggara.

Pasang surut pada hubungan pada level politik misalkan sengketa laut atau batas-batas wilayah mempengaruhi hubungan baik. Karena pemimpin negara satu dengan yang lain tidak setuju, kalau ada klaim-klaim yang mengganggu negara lain dan hal itu bisa menjadi sengketa. Karena kepentingan ekonomi yang lebih besar itu tetap mendorong agar Indonesia tidak memutuskan hubungan itu. Sehingga dipermukaan secara politik hubungan itu terkadang renggang namun secara ekonomi tidak. Begitu juga dengan hubungan Indonesia dan China, mungkin ada beberapa kasus yang membuat hubungan itu renggang akan tetapi kepentingan-kepentingan ekonomi terutama kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan, Industri ataupun Perekonomian ketika ada kerenggangan mereka berusaha untuk menormalisasi hubungan tersebut, karena ketika hubungan normalisasi itu terjadi, perdagangan dengan China akan menjadi lebih mudah lagi. Iklim di dalam negeri mempengaruhi arus dari perdagangan. Ketika di dalam negeri itu kisruh politiknya ada isu-isu sentimen terhadap China itu akan mengganggu proses arus investasi dan proses perdagangan maka dari itu Kementerian-Kementerian terkait itu akan selalu mendorong normalisasi hubungan. Meskipun ada kerenggangan akan tetapi biasanya kerenggangan-kerenggangan itu akan mudah diatasi. (M.Faris Al-Fadhat, 2018)

Kondisi politik dalam negeri yang mendorong negara untuk melakukan kerja sama baik bilateral maupun multilateral disegala sektor kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Namun hal ini dipengaruhi oleh politik domestik yang diwujudkan dalam sebuah kebijakan luar negerinya pada umumnya, kebijakan luar negeri dibentuk sesuai dengan kepentingan nasionalnya otoritas kenegaraan yang berasal dari sebuah parpol, dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Sehingga pembuat kebijakan yang dituangkan dalam UU No.6 Tahun 2016 benar merupakan tujuan kerja sama dalam memperkokoh pertahanan keamanan NKRI.

Sejak tahun 2014 hubungan bilateral Indonesia dan China semakin erat. Di tandai dengan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara yang juga semakin prospektif dan menguntungkan. Apalagi jumlah turis China ke Indonesia sudah mencapai 900 ribu pertahun. (Hubungan Bilateral Indonesia-China Semakin Erat, 2014) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto menyambut baik realisasi kerja sama antara pengusaha Indonesia dan China dengan membuka pabrik-pabrik baru di

Indonesia. Pembukaan pabrik baru ini akan mengurangi beban pemerintah di sektor tenaga kerja. Novanto berharap realisasi kerja sama antara pengusaha Indonesia-Cina terus terlaksana dengan munculnya pabrik-pabrik baru. Selain itu menurutnya pemerintah telah melakukan berbagai kemudahan investasi bagi para pengusaha yang akan menanamkan modal di Indonesia. DPR siap membantu pemerintah meyakinkan para investor agar masuk ke Indonesia. Sehingga tidak perlu ada ketakutan untuk berinvestasi di Indonesia. (Ketua DPR Sambut Baik Kerja Sama Indonesia-China, 2015)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi Cina di Indonesia mencapai US\$1.6 miliar hingga triwulan ketiga 2016. Nilai tersebut masuk dalam peringkat tiga terbesar, setelah Singapura dan Jepang. (Renaldi, 2017) Seluruh fraksi di Komisi I DPR RI menyetujui RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang kerja sama aktivitas dalam pertahanan. Hal tersebut terungkap dalam rapat Komisi I terkait pandangan fraksi atas RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang kerja sama aktivitas dalam bidang pertahanan pada 10 Februari 2016 di ruang rapat Komisi I Senayan Jakarta.

Meski seluruh fraksi menyetujui, namun pada kesempatan itu fraksi Partai Gerinda dan fraksi PAN membuat catatan tersendiri. Anggota Komisi I DPR RI, Andika Pandu Puragabaya yang membacakan pandangan fraksi Partai Gerinda mengatakan bahwa fraksi menyetujui RUU tersebut dengan empat catatan. Fraksi Partai Gerinda menyetujui kedua RUU tersebut untuk dibahas ketingkat dua pada rapat paripurna dewan selanjutnya dengan empat catatan. Empat catatan itu adalah dalam pelaksanaan UU tersebut nantinya sesuai amanat UU NO.24 Tahun 2000 pasal 4 ayat 2, pemerintah Indonesia harus berpedoman pada kepentingan nasional yang berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan baik hukum nasional dan internasional. Kedua, para pemangku kebijakan terkait *stakeholder* menempatkan kepentingan nasional dan dengan teguh mampu menjaga rahasia negara. Catatan ketiga adalah agar persetujuan ini dapat diaplikasikan secara maksimal perlu adanya penanganan secara koordinatif dan berkesinambungan antara semua instansi pemerintah, maupun kerja sama antar pemangku jabatan terkait sesuai dengan bidang dan lingkup kerja sama. Catatan ke empat dari fraksi Partai Gerinda yang dibacakan

Andika adalah jika terjadi perselisihan kiranya dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi dalam komite bersama. Dan apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing. Dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dapat melalui saluran diplomatik. (Ayu, Seluruh Fraksi Setuju Pembahasan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman dan Indonesia-China, 2016)

Sementara itu fraksi PAN dalam pandangannya yang disampaikan Budi Youyastri mengatakan bahwa dalam konteks kerja sama internasional ini hendaknya didasari atas kepentingan nasional dan kerja sama yang saling menguntungkan. Untuk itu dalam setiap kerja sama di bidang pertahanan selanjutnya Fraksi PAN meminta agar proses *transfer of technology* dapat diwujudkan. Indonesia juga dapat tetap memiliki hak paten yang tetap muncul dalam proses produksi alutsista. (Ayu, Seluruh Fraksi Setuju Pembahasan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman dan Indonesia-China, 2016)

Wakil Ketua Komisi I, Asril Hamzah Tanjung dalam laporan yang dibacakannya di depan sidang Paripurna DPR RI pada 1 Maret 2016 mengatakan bahwa aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Untuk itu dikatakan politisi dari Fraksi Partai Gerinda, kerja sama pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Disamping itu kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan Negara.

Dalam rapat paripurna DPR RI Asril selaku wakil ketua komisi I meminta persetujuan kepada anggota rapat agar dapat mengesahkan RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang kerja sama aktivitas dalam bidang pertahanan untuk dapat disahkan menjadi UU yang kemudian disetujui dari seluruh peserta rapat paripurna DPR RI yang

dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang menjadi tanda disetujuinya laporan pimpinan Komisi I tersebut. Sebagaimana mekanisme di DPR RI, sebelum masuk dalam pembicaraan tingkat II/Pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI, RUU tersebut juga telah melalui pembahasan baik lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar dan akademisi. Baru kemudian dibahas dalam pembicaraan tingkat I yang akhirnya dalam pembicaraan tersebut seluruh fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI dan pemerintahan menyetujui RUU tersebut untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat selanjutnya, yakni tingkat II/pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI untuk kemudian disahkan menjadi Undang - Undang. (Ayu, Paripurna DPR Setujui Kerjasama Pertahanan Indonesia-China, 2016)

Pengaruh sengketa Laut China Selatan tidak hanya berdampak kepada masalah politik atas konflik tersebut namun juga atas pengaruh hegemoni ekonomi negara-negara besar seperti China. Sebagian besar produk yang membanjiri pasar Indonesia berasal dari China. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya produk suatu negara termasuk produk Indonesia, tidak mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat mengancam posisi pasar domestik. Dengan kata lain, keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) merupakan faktor yang dominan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai organisasi dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari bisnis *corporate*. Bagi pelaku bisnis dengan tidak membedakan apakah swasta atau BUMN, peningkatan keunggulan saing dapat dibangun melalui tingkat kesadaran yang tinggi terhadap faktor produktivitas, profesionalisme, kreativitas, perilaku efisiensi, kualitas produk dan layanan yang prima, yang notabene merupakan ujung tombak dalam menghadapi *global competition*. Faktor produktivitas dan efisiensi menjadi komponen dasar dalam membangun harga produk yang mampu bersaing di pasar global. Tetapi harga murah bukan komponen satu satunya. Kualitas produk dan layanan prima kepada pelanggan merupakan faktor dominan dalam menciptakan *customer satisfaction* dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

Dalam konteks ini maka profesionalisme dan kreatifitas menjadi penting untuk dapat memenuhi dan mengantisipasi keinginan para pelanggan. Karena dari itu Indonesia masih sangat bergantung dengan China yang mana hubungan kerja sama ekonomi dengan China selama ini semakin meningkat. Dan untuk memperkuat bidang pertahanan suatu negara, maka bidang perekonomian dahulu lah yang harus diperkuat, untuk memperkuat perekonomian suatu negara maka SDM nyalah yang harus disiapkan. Maka dari itu untuk memperkuat militer Indonesia, perekonomian Indonesia harus kuat terlebih dahulu tidak bergantung pada negara lain, karena sekarang kita menjalin hubungan kerja sama ekonomi dengan China dengan sangat baik dan membuat banyak keuntungan dari tahun ketahun maka akan lebih baik jika kita memanfaatkan kesempatan yang ada dengan memperkuat kerja sama ekonomi dan militer dengan China seperti yang sudah ditawarkan oleh China, agar ketika nanti apabila China pun menjadi ancaman di masa mendatang kekuatan ekonomi dan militer kita sudah siap berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain.

ECONOMIC MILITARY CONDITION FACTOR : Adanya Kerja Sama untuk Meningkatkan Investasi

Kondisi ekonomi dalam negeri, dalam meningkatkan perkembangan ekonomi domestik, negara melalui para aktor pembuat dan pengambil kebijakan dapat menentukan kemana arah kebijakan luar negerinya. Sehingga wujud penandatanganan MoU dan dikuatkan juga dengan UU tentang kerja sama dibidang militer dengan China. Dengan demikian kerja sama dibidang lain juga ikut dilaksanakan khususnya ekonomi mengingat China merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi Indonesia yang dinilai masih belum stabil yang dapat diukur dari GDP pertahun juga peneglolaan SDA yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Sehingga kerja sama dan kehadiran China menjadi penyokong utama bagi kelanjutan perkembangan ekonomi Indonesia.

Situasi ekonomi dan militer di Indonesia termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam hal pertahanan dan keamanan. Dalam kepentingan ekonomi kerja sama ini sebagai penghubung kerja sama dibidang ekonomi dengan China dan bertujuan untuk meningkatkan investasi China di Indonesia. Dalam

kepentingan militer yaitu memiliki kerja sama dengan China memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia khususnya dalam peningkatan kemampuan dan pengalaman prajurit TNI di lapangan.

Dalam setiap tahun, nilai perdagangan melintasi Laut China Selatan senilai US\$ 5,3 triliun. Indonesia sendiri mempunyai jatah pasar yang relatif besar mengingat ekspor impor ke China dan Jepang semuanya melalui Laut China Selatan. Belum lagi eksplorasi minyak dan gas di laut Natuna. Apabila sampai terjadi konflik bersenjata, dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian yang di derita oleh Indonesia dan dampaknya pada perekonomian Indonesia. Sampai saat ini, para ahli ekonomi Indonesia belum memperhitungkan berapa besar kerugian ekonomi bagi Indonesia bila konflik bersenjata meletus di Laut China Selatan.

Sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 104,58 triliun. Anggaran tersebut turun 4,05 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2016. Selain untuk peremajaan, Menteri Pertahanan Ryamizard akan fokus pembahasan anggaran untuk penambahan armada di Perairan Natuna. Anggota Komisi Pertahanan DPR RI Syarif Hasan menilai pemotongan anggaran negara untuk Kementerian Pertahanan dan TNI tidak perlu dilakukan pemerintah. Menurutnya, anggaran kekuatan militer justru perlu ditambah agar TNI disegani negara-negara dunia. Politikus Partai Demokrat ini mendukung penambahan anggaran pertahanan untuk meningkatkan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF) TNI 2015-2019. (CNNINDONESIA, 2016)

Dalam pembahasan rencana anggaran pada APBN 2017 untuk KEMHAN dan TNI, DPR bersama pemerintah melaksanakan pembahasan terkait nilai yang diproyeksikan untuk KEMHAN dan TNI adalah sekitar Rp104 triliun, jauh lebih rendah ketimbang wacana dari pemerintah yang menginginkan 1,5 persen APBN dikerahkan untuk sektor pertahanan nasional. Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu mengatakan fokus anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI anggaran 2017 itu diarahkan untuk peremajaan sistem persenjataan /arsenal TNI.

Sesuai RAPBN 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI senilai Rp104,58 triliun. Berlainan dengan Kepolisian Indonesia

yang merupakan pos tunggal, maka anggaran negara disektor pertahanan ini diserahkan kepada Kementerian Pertahanan yang lalu membaginya untuk keperluan Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI AL, Markas Besar TNI AU, dan Markas Besar TNI AD. Pada sisi lain, proses pembelian arsenal dan sistem kesenjataan TNI harus patuh pada UU Nomor 16/2009 tentang Industri Pertahanan, yang di antaranya mengharuskan pelibatan industri pertahanan dalam negeri. (MONITORDAY.com)

Menurut sumber data dari *global fire power 2017* kekuatan militer Indonesia berada di urutan ke-14 atau merupakan 15 besar kekuatan tempur di dunia dan China ada pada urutan ke 3 setelah Amerika di posisi pertama, dan Rusia diposisi kedua. (globalfirepower, t.thn.) Berdasar data dari *Global Fire Power* beragam pesawat militer yang dimiliki Indonesia berjumlah 441 unit, tank 418 unit, kapal perang beragam jenis 221 unit, dan pasukan tempur aktif sebanyak 435.750 personel. Dengan kekuatan militer sebesar itu selain menempatkan posisi Indonesia di urutan ke-14 kekuatan militer dunia juga menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara. (Suhendi, 2017)

Pada ADMM dan ADMM Plus 2017 Clark Filipina pada 22-25 Oktober 2017 Menhan RI menerima CC Menhan China H.E General Chang Wanquan yang mana didalam kesempatan itu Menhan Indonesia menyampaikan bahwa China adalah sahabat dekat dan merupakan negara yang penting di kawasan dan sudah sejak lama saling membangun kerja sama di bidang pertahanan RI. RI dan China telah banyak menjalin kerja sama pertahanan yang erat khususnya di bidang matra laut diantaranya bidang pendidikan, latihan dan pertukaran kunjungan pejabat yang sampai saat ini telah berjalan dengan sangat baik. Kerja sama tersebut tentunya sangat memberi dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan serta profesionalitas prajurit guna menunjang pelaksanaan tugas Angkatan Laut kedua negara.

Selain kerja sama militer/pertahanan dalam forum ASEAN dan ADMM, saat ini Indonesia memberikan usulan untuk kerja sama yang kami sebut sebagai *Our Eyes*. Kerja sama ini menjadi salah satu inisiatif dari Indonesia dengan maksud untuk melawan terorisme dan radikalisme di kawasan bersama-sama Indonesia dan China dapat bersama-sama menjaga keamanan kawasan. Direncanakan *Our Eyes* memiliki

fokus kegiatan pada bidang intelijen melalui pertukaran informasi terbaru, yang bersifat rahasia mengenai insiden dan ancaman terorisme saat ini, pertukaran tenaga ahli, pertemuan untuk saling berbagi informasi.

Kemudian usaha TNI dalam jangka pendek dalam postur pertahanan keamanan ditengah situasi ini, perlu dibangun suatu bentuk kontra skema pertahanan keamanan konvensional jangka pendek yang sederhana tapi memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap serangan Militer maupun Non Militer yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI. Sistem pertahanan ini harus terintegrasi dengan sistem Komando Pertahanan Nusantara dan Doktrin TNI yang bersifat defensif-preventif aktif. Pertahanan keamanan sederhana dengan daya tangkal tinggi itu adalah dengan membangun pertahanan “statis” terpadu dengan basis Satelit, Radar, Sonar dan Rudal di ZEE dengan teknologi canggih yang mandiri agar lebih efektif dan efisien menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Sehingga alutsista yang ada dapat diberdayakan secara optimal. Dan untuk kebutuhan perangkat lunak memang dituntut menggunakan produk sendiri guna lebih menjaga keamanan dan kenyamanan tentunya. Sebetulnya sudah banyak generasi muda bangsa Indonesia yang mampu membuat *software* untuk keperluan militer, membuat sistem pertahanan dan keamanan Nusantara yang handal. Skema pertahanan sederhana tersebut bisa berupa model “SISKAMLING LAUT” yang merupakan zona pertahanan pertama NKRI. Dengan Sishankamrata yang terintegrasi maka kita dapat menciptakan jaringan pertahanan yang meliputi pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Model siskamling laut yang dimaksud Radar dan Rudal *Surface to Surface Missile* (SSM) ditempatkan disepanjang garis pantai dan dititik-titik rawan yang strategis, terutama diwilayah yang diperkirakan mengandung cadangan migas. Termasuk di pintu-pintu selat yang merupakan lalu lintas perdagangan nasional dan internasional ALKI. Radar dan Rudal SSM juga ditempatkan di pulau-pulau terluar NKRI yang strategis sebagai pengamanan Kluster Perikanan yang juga berfungsi sebagai pangkalan armada Kapal Cepat Rudal (KCR) Angkatan Laut Republik Indonesia. Paling tidak Indonesia minimal memiliki pos pertahanan matra terpadu di dua belas pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Keuntungan lain dari pembuatan pos-pos terluar ini adalah dapat menjangkau wilayah-wilayah yang

terpencil secara rutin yang memang sering mejadi lokasi *illegal fishing*, penyelundupan, dan sebagainya.

Sedangkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata) plus di laut yang “dinamis” dapat dilakukan dengan model daratan, yakni melibatkan semua elemen yang ada, termasuk para nelayan misalnya yakni Mendesain khusus kapal-kapal nelayan kita sehingga bisa menjadi mata dan telinga dengan dilengkapi peralatan radar dan sonar sebagai pendukung siskamling di laut. Sedangkan sebagai alat pemukul utama adalah Kapal Cepat Rudal (KCR) sekelas Trimaran yang dilengkapi dengan rudal sekelas Yakhont atau paling tidak C802 yang memiliki jangkauan 200 sampai 400 mil laut. Kapal Perang kelas KCR Trimaran bertugas mengamankan ZEE dari kapal-kapal asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI. Memperbanyak jumlah kapal-kapal patroli cepat, dengan kecepatan diatas 40 knot yang dilengkapi dengan rudal SSM. Kapal-kapal patroli ini ditempatkan di sepanjang ALKI sebagai satpam laut untuk memberantas maling-maling kekayaan laut Indonesia tanpa kompromi. Untuk pertahanan keamanan teritorial kedaulatan NKRI konvensional adalah dengan membagi kawasan Nusantara dalam distrik-distrik strategis baik menyangkut pangan, energi, industri, dan sebagainya guna untuk penempatan zona komando matra TNI yang terintegrasi dengan sishankamrata plus. Terutama di daerah-daerah medan pertempuran Non Militer. (Setiawan) Total personil militer Indonesia menurut sumber data *Global Fire Power* 975,750, sedangkan total personil militer China adalah 3.712.500 personil. (Power)

Tabel VI. 1 : Jumlah Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia dan China

No.	Angkatan Udara	Indonesia	China
1.	<i>Total Aircraft Strength</i>	441	2.955
2.	<i>Fighter Aircraft</i>	39	1.271
3.	<i>Attack Aircraft</i>	58	1.385
4.	<i>Transport Aircraft</i>	170	782
5.	<i>Trainer Aircraft</i>	111	352
6.	<i>Total Helicopter Strength</i>	147	912
7.	<i>Attack Helicopter</i>	5	206

Sumber : *Global Fire Power* 2017

Tabel VI. 2 : Jumlah Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia dan China

No.	Angkatan Darat	Indonesia	China
1.	<i>Combat Tanks</i>	418	6.457
2.	<i>Armored Fighting Vehicles</i>	1.089	4.788
3.	<i>Self Propelled Artillery</i>	37	1.710
4.	<i>Towed Artillery</i>	80	6.246
5.	<i>Rocket Projectors</i>	86	1.770

Sumber : *Global Fire Power 2017*

Tabel VI. 3 : Jumlah Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia dan China

No.	Angkatan Laut	Indonesia	China
1.	<i>Total Navy Assets</i>	221	714
2.	<i>Aircraft Carriers</i>	0	1
3.	<i>Frigates</i>	7	51
4.	<i>Destroyers</i>	0	35
5.	<i>Corvettes</i>	24	35
6.	<i>Submarines</i>	4	68
7.	<i>Patrol Craft</i>	74	220
8.	<i>Mine Warfare Vessels</i>	12	31

Sumber : *Global Fire Power 2017*

Isu yang berkembang dan dibicarakan pada update kunjungan Menhan Republik Rakyat Cina, General Chang ke Indonesia pada 16 Desember 2013 sebagai berikut China bukan saja menghadapi peluang sangat baik di kawasan tetapi juga resiko dan tantangan yang sangat besar, Pemerintah RRC akan terus menghormati kedaulatan negara-negara tetangga dan membangun menurut kebijakannya masing-masing, China melihat kebijakan regional sangat tergantung kepada usaha semua pihak yang berkepentingan dan mendorong penyelesaian sengketa yang terjadi didasarkan atas dialog, negosiasi dan prinsip saling menghargai, Menhan China mengatakan, sejak 60 tahun lalu, hubungan Indonesia-China mengalami pasang surut. Namun perlu dicatat bahwa persahabatan sudah terjadi sejak lama, antara bukan saja negara tetapi kedua rakyatnya, pihak China merasa harus mengembangkan kedaulatan wilayah udara

nasional. Pemberlakuan ADIZ (*Air Defence Identification*), tidak akan mengganggu dan mengubah sifat hukum dan posisi hukum dari wilayah udara territorial, pihak China ingin mendiskusikan secara lebih dalam tawaran bantuan pengawasan Selat Sunda yang sebelumnya pernah diangkat saat kunjungan Menhan RI ke China tahun 2012.

Hasil pelaksanaan *Defence Industry Cooperation Meeting* (DICM) ke-6 di Beijing (BAIS TNI). Pertemuan *Defence Industry Cooperation Meeting* (DICM) ke-6 dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 21 Juli 2017 di Beijing-Republik Rakyat China. Pertemuan *Defence Industry Cooperation Meeting* (DICM) merupakan forum kerja sama bilateral Republik Indonesia–Republik Rakyat China di bidang industri pertahanan. Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI, Dr. Sutrimo dan Delegasi RRC dipimpin oleh *Deputy Director General, Department of Military Trade and Foreign Affairs, State Administration for Science, Technology and Industry for National Defence*, Mr. Ma Weihua.

Pertemuan formal pembahasan dan penandatanganan *Agreed Minutes* membahas 48 butir kesepakatan yang memuat 42 butir kerja sama bilateral industri pertahanan Republik Indonesia–Republik Rakyat China. Terdapat 22 usulan kerja sama dengan beberapa butir usulan kerja sama diantaranya masih memerlukan klarifikasi lanjutan dari *stakeholders* terkait, misalnya TNI dan PT. Pindad. Delegasi Republik Indonesia memprioritaskan pembahasan 2 (dua) isu, yaitu program *transfer of technology* (ToT) C-705 *missile* dan program *joint development UAV mission system*. Secara khusus juga menyampaikan Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagai landasan pentingnya hubungan kerja sama di bidang industri pertahanan khususnya kebijakan kerja sama *transfer of technology*, *offset-local content-countertrade obligation of minimum 85% foreign weapon procurement contract*, serta tidak ada ikatan politis yang dijadikan alasan sebagai pembatasan embargo.

Pada pertemuan bilateral Ketua Delegasi China menyampaikan pentingnya DICM sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama industri pertahanan kedua negara dan diharapkan dapat meningkatkan kerja sama strategis yang komprehensif. Ketua Delegasi RI menekankan pentingnya kedua pihak untuk menindaklanjuti hasil DICM sebelumnya untuk mencerminkan potensi sebagai mitra strategis yang komprehensif,

serta menyoroti dua proyek strategis yaitu program *Transfer of Technology* rudal C-705 dan *Joint Development UAV Mission System* untuk menjadi prioritas.

Penjelasan dari proyek industri pertahanan China terdiri dari pertama ALIT memberikan penjelasan tentang *Joint Development UAV* dengan PT LEN dan PT DI, penawaran Sistem senjata rudal pertahanan udara LY-80, *Precision Guided Bomb*, *Multiple Launch Rocket System* (MLRS). Kedua CPMIEC memberikan penjelasan tentang ToT C-705 dengan PT DI, proyek rudal anti kapal C-705 dan C-704, penawaran sistem senjata rudal pertahanan udara FK-1000, FK-3, penawaran kerja sama ToT QW-3 SKD, penawaran *Multi-purpose Tactical Precision Attack Missile Weapon System* CM-501GA. Ketiga CSOC memberikan penjelasan tentang proposal kerja sama dengan PT LEN, dan PT PAL terkait konstruksi kapal, pasokan material, dukungan teknis. Keempat NORINCO memberikan penjelasan tentang sistem pertahanan udara *Sky dragon 50*, sistem pertahanan udara *Twin Barel*s 35 mm, kerja sama dengan PT Pindad, proyek MLRS. Kelima CETC memberikan penjelasan tentang program *Defense Electronic Complex of Indonesia* dengan PT LEN, kerja sama dengan PT PAL. Keenam CEIEC memberikan penjelasan tentang kerja sama *Maritime Radar Surveillance* dengan PT LEN.

5. PENUTUP

Banyak hal yang membuat Indonesia harus juga memfokuskan kerja sama Indonesia dengan Negara lain. Secara harfiah Indonesia punya hubungan yang baik dengan China. Indonesia tidak bisa berdiri di atas satu kaki sendiri, dengan kata lain Indonesia masih mengandalkan negara lain. Indonesia harus berdiri di dua kaki. Apakah itu kekuatan global ataupun kekuatan kita di dalam ASEAN. Pertimbangan Menteri Pertahanan Indonesia Pak Ryamizard adalah pertimbangan negara dan bukan kepentingan pribadi, karena ini merujuk pada kebijakan luar negeri Indonesia yang merupakan diplomasi Indonesia. Diplomasi internasional itu harus berjalan sesuai dengan rezim yang berlaku. Rezim Indonesia sekarang adalah rezimnya Jokowi. Indonesia banyak mempunyai kerja sama dengan China. Dimana kebijakan luar negeri Jokowi dengan ide poros maritim merupakan bisikan dari sejumlah orang yang menjadi bagian dari kesuksesan Jokowi memimpin Indonesia. Pengaruh ideologis maksudnya

adalah partai politik yang menaungi Jokowi, peran ketua partai, peran ketua fraksi di DPR, kader partai serta peran pengalaman historis, para akademis, praktisi dan TNI. Kerja sama pertahanan Indonesia dengan China apabila secara bilateral Indonesia adalah salah satu mitra strategis China, begitu pula dengan China, Indonesia adalah mitra strategis China. Akan tetapi Indonesia punya standar-standar yang sama dengan negara-negara lain. Hampir keseluruhan *Defence Cooperation Agreement (DCA)* itu mengikat karena ketika kembali ke negara masing-masing harus di ratifikasi oleh Parlemen. Setelah itu baru di sahkan menjadi Undang-Undang.

Peningkatan kerja sama Indonesia dalam bidang teknologi industri, rudal, roket, peluru kendali, *propeller* (baling-baling untuk menjalankan kapal ataupun pesawat terbang), Indonesia mempercayakan proses *Transfer Of Technology (ToT)*, pembelian rudal-rudal yang sudah ditandatangani bahkan banyak tawaran teknologi-teknologi China yang ingin diberikan kepada Indonesia. Kapal-kapal Indonesia sudah punya kelengkapan sebagian dengan rudal c705 dan beberapa jenis rudal lainnya. Indonesia butuh teknologi China dan Indonesia butuh untuk meningkatkan kerja samanya dengan China. Latihan - latihan seperti Mabes TNI dengan China, Indonesia punya *navy to navy talk*, *army to army talk*, *airman to airman talk* juga punya akan tetapi belum *intensif* namun sudah berjalan secara *parsial*. *Military to military* Indonesia China itu sudah berjalan secara *parsial*. Kemudian Indonesia juga *changing officer* setiap tahun dengan China. Indonesia juga mengirimkan siswa – siswa Tentara Nasional Indonesia, contohnya seperti SESKO TNI, Lemhanas juga mengirimkan personilnya dan ini berlaku *resiprokal* (bersifat saling berbalasan).

Sejauh ini China lebih banyak menerima dari pada mengirimkan untuk personil, akan tetapi Indonesia lebih banyak membeli peralatan- peralatan secara teknologi seperti IT, China mempunyai keunggulan dalam bidang itu dan mereka tidak keberatan untuk *transfer* ke Indonesia. Akan tetapi perlu diingat dengan istilah “tidak ada makan siang gratis”. Keinginan-keinginan China itu sepenuhnya juga berpengaruh dengan bagaimana politik yang diinginkan oleh China itu bisa dibantu oleh Indonesia khususnya yang berkaitan dengan COC (*Code of Conduct*) karena Indonesia sudah dalam proses *framework* yang sudah di tandatangani saat ini. Namun itu adalah sebuah kemajuan ASEAN untuk melakukan satu *agreement* dengan China bagaimana bertingkah laku/

bertata laku di Laut China Selatan itulah yang diingkan oleh China di Laut China Selatan.

Alasan ekonomi akan memperkuat pertahanan. Sebuah negara bisa memperkuat pertahanan negara tersebut dengan didukung ekonomi yang baik. Banyak sinergi yang terjadi antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Kementerian Luar Negeri memutuskan perjanjian-perjanjian internasional, memberikan masukan-masukan ke Kementerian Pertahanan. (Kolonel Kav Oktaheroe Ramsi, 2017) Undang-Undang disahkan sebagai landasan agar apabila terjadi sesuatu kedua negara memiliki payung hukum yang sama. Undang-Undang No.6 tahun 2016 yang disahkan pada tanggal 30 Maret 2016 adalah Undang-Undang terusan terusan, jadi yang belum selesai di tahun-tahun sebelumnya untuk dijadikan Undang-Undang di tahun-tahun selanjutnya. (H.A. Hanafi Rais, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- (2017, November 16). Diambil kembali dari MABES TNI: <http://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>
- (2017, November 16). Diambil kembali dari MABES TNI: <http://tni.mil.id/pages-3-jati-diri-tni.html>
- 2017 *China Military Strength*. (t.thn.). Dipetik Februari 8, 2018, dari [globalfirepower.com: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china)
- Adidharta, S. (2015, Juni 24). *Etnis China Tionghoa Masih Nomor Satu Kuasai Bisnis dan Ekonomi Indonesia*. Dipetik November 6, 2017, dari KOMPASIANA: https://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta_2/etnis-china-tionghoa-masih-nomor-satu-kuasai-bisnis-dan-ekonomi-indonesia_552985f2f17e61b07ed623ac
- Agustino, L. (2017, Juli 30). Hubungan Baru Indonesia-China dan Membangun Poros Maritim Dunia. Kuartal kedua. Dipetik Februari 2, 2018, dari Hubungan Baru Indonesia-China dan Membangun Poros Maritim Dunia: https://www.researchgate.net/publication/318773103_Hubungan_Baru_Indonesia-China_dan_Membangun_Poros_Maritim_Duni
- Angel Rebaso, a. J. (2002). *The Military and Democracy in Indonesia*. RAND.

- Arsana, I. M. (2012, September 27). *Meninjau Ulang Posisi Indonesia di Laut China Selatan*. Dipetik Desember 14, 2017, dari <http://puzzleminds.com>: <http://puzzleminds.com/meninjau-ulang-posisi-indonesia-di-laut-china-selatan/>
- as. (2017, Oktober 6). *Mampukah TNI Lindungi Indonesia dari Agresi Cina?* Diambil kembali dari [dw.com](http://www.dw.com): <http://www.dw.com/id/mampukah-tni-lindungi-indonesia-dari-agresi-cina/a-40838965>
- Atriana, R. (2016, Juni 24). *Kunjungan Jokowi ke Natuna Sinyal Agar China Tak Main Api dengan Indonesia*. Dipetik Januari 26, 2018, dari [detikNews](http://detikNews.com):
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono. (2015, November). *KUNJUNGAN MENTERI PERTAHANAN KE NATUNA UNTUK MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH TERDEPAN*. Dipetik November 24, 2017, dari Kemhan Web site: <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/7.-Wira-November-Desember-2015.pdf>
- Muhaimin. (2018, Februari 8). *China Kerahkan Jet Tempur Su-35 ke Laut China Selatan*. Dipetik Februari 12, 2018, dari Sindonews.com: <https://international.sindonews.com/read/1280321/40/china-kerahkan-jet-tempur-su-35-ke-laut-china-selatan-1518040571>
- Nugroho, B. P. (2017, Juli 26). *Bahas Dosen Anggota HTI, Menristekdikti Akan Kumpulkan Rektor*. Dipetik April 27, 2018, dari Detik.com: <https://m.detik.com>
- Parulian, S. (2013). *Peluang & Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peningkatan Kekuatan Militer China*. (2012, Maret). Dipetik November 25, 2017, dari berkas.dpr.go.id: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-5-I-P3DI-Maret-2012-69.pdf
- Perkasa, A. (2017, Mei senin). *HTI Tolak Tuduhan Makar Pemerintah*. Dipetik April selasa, 2018, dari cnnindonesia.com: <http://m.cnnindonesia.com>
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). *Politik Luar Negeri*. Bandung: PT : Remaja Risdakarya.
- Power, G. F. (t.thn.). *2017 China Military Strength*. Dipetik April 6, 2018, dari https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china